

Implementation of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2015 Concerning the Preservation of Betawi Culture (Case Study: Education Curriculum)

Ahmad Said Saputra¹, Iskandarsyah Siregar^{2*}

Universitas Nasional, Jakarta

Corresponding Author: Iskandarsyah Siregar regaranggi@presidency.com

ARTICLE INFO

Keywords: Culture, Preservation, Betawi Language, Implementation, Curriculum

Received : 5 February
Revised : 18 February
Accepted: 19 March

©2023 Saputra, Siregar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Based on DKI Jakarta Regional Regulation No. 4 of 2015 concerning Preservation of Betawi Culture in the education curriculum there is still no Betawi language education. As a result, not a few Betawi people don't care or even lack in preserving the Betawi language. Several solutions were generated to solve this problem, namely compiling a master plan for the preservation of Betawi language and literature. Purpose: to conduct a literature review that examines the implementation of DKI Jakarta Provincial Regulation No. 4 of 2015. Method: this literature study uses the narrative review method by analyzing various journals from the Garuda online database and Google Scholar relating to DKI Jakarta Provincial Regulation No. 4 of 2015. Conclusion: Lack of awareness of DKI Jakarta Culture Service officials and the Education and Community Service Office of the importance of researching and socializing the protection of the Betawi language

Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi (Studi Kasus: Kurikulum Pendidikan)

Ahmad Said Saputra¹, Iskandarsyah Siregar^{2*}

Universitas Nasional, Jakarta

Corresponding Author: Iskandarsyah Siregar regaranggi@presidency.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebudayaan,
Pelestarian, Bahasa Betawi,
Implementasi, Kurikulum

Received : 5 February

Revised : 18 February

Accepted: 19 March

©2023 Saputra, Siregar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Berdasarkan Perda DKI Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dalam kurikulum pendidikan masih belum adanya pendidikan bahasa Betawi. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat Betawi yang tidak peduli bahkan kurang dalam melestarikan bahasa Betawi. Beberapa solusi yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu Menyusun rencana induk pelestarian bahasa dan sastra Betawi. Tujuan: melakukan tinjauan studi pustaka yang menelaah implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015. Metode: studi pustaka ini menggunakan metode narrative review dengan menganalisis berbagai jurnal dari database online *Garuda* dan *Google Scholar* yang berkaitan dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015. Kesimpulan: Kurangnya kesadaran pejabat Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat akan pentingnya meneliti dan mensosialisasikan perlindungan bahasa Betawi

PENDAHULUAN

Keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai asal dan budaya yang berbeda, yang bersatu dan berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia saat itu, dan warisan ini masih dapat kita manfaatkan sampai sekarang, tidak dapat dipisahkan dari dasar Negara Indonesia (Yetno, 2021). Kedaulatan dan persatuan yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia pada saat mengusir penjajah menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki berbagai latar belakang Masyarakat Adat dan tradisi budaya yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu tercapainya kemerdekaan Bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga menunjukkan bahwa ada variasi ras, etnis, dan budaya yang signifikan di negara ini. Salah satunya Jakarta, Ibu Kota Indonesia dan pusat politik dan ekonomi negara, merupakan tempat percampuran berbagai budaya daerah. Orang-orang mulai bermigrasi ke *megacity* ini dari seluruh nusantara selama era kolonial ketika masih dikenal sebagai Batavia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alhasil, kini ada sekitar sepuluh juta orang yang tinggal di Jakarta.

Kemajuan informasi dan teknologi yang pesat menyebabkan tergerusnya kebudayaan yang ada. Dapat kita amati salah satunya kebudayaan Betawi mulai tergerus dari masyarakatnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pergaulan dengan masyarakat pendatang, eksodus sebagian Masyarakat ke negara lain, dan masuknya teknologi kedalam kehidupan mereka. Tradisi dalam kebudayaan betawi salah satunya adalah 'bahasa Betawi' akan mulai tergerus bahkan dapat hilang jika tidak dijaga dan diperhatikan secara memadai oleh Pemerintah Indonesia. Setiap hak rakyat Indonesia, harus dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengimplementasikan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Budaya Betawi, maka perlu dijaga dan dilestarikan budaya tersebut oleh semua pihak dan ini membutuhkan dedikasi dan kerja sama semua pihak.

Kewajiban Negara dalam melindungi masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 32 Amandemen UUD 1945 (4):

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam rangka peradaban global dengan menjamin kebebasan rakyat untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
2. Bahasa daerah dihargai oleh negara sebagai kekayaan budaya bangsa dan dilestarikan. (Ali, 2022)

Seluruh aparat pemerintah, khususnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memelihara bahasa daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Fasilitas dan pelayanan yang sama, pendidikan yang lebih baik, menjaga tradisi budaya, dan memiliki komitmen bersama semuanya dapat dilakukan untuk membantu strategi Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk melestarikan budaya Betawi, generasi muda harus mengambil kendali dan melanjutkan budaya Betawi ke masa depan dengan memasukkan bahasa Betawi ke dalam kurikulum sekolah dasar Jakarta sebagai langkah awal dalam memperkenalkan budaya Betawi. Satu-satunya tujuan dari ini adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak muda tentang budaya lokal Indonesia. Jika budaya hilang, nilai dan peradaban juga akan hilang, maka budaya harus dipertahankan dan dilestarikan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian yang disajikan, penulis tertarik untuk meneliti keberadaan bahasa Betawi di dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah bahasa Betawi masuk dalam kurikulum sekolah dasar. Penulis berupaya mencari cara untuk mempertahankan budaya bahasa Betawi, terutama mengingat dampak globalisasi yang menjadi tantangan bagi adaptasi budaya lokal. Fokus penelitian ini adalah keberadaan Bahasa Betawi dalam Kurikulum Pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebudayaan bukan lagi sekadar kumpulan karya seni, buku, perkakas, museum, struktur, ruang interior, furnitur, dan barang lainnya. Menurut van Peursen (1976: 11), budaya sebagian besar terkait dengan aktivitas manusia, termasuk pekerjaan, emosi, pemikiran, inisiatif, dan kreasi (Kistanto, 2017). Definisi kebudayaan ini merujuknya sebagai "hasil dari rasa, niat, dan proses penciptaan manusia." Dalam pendekatan ini, (manusia) yang berbudaya adalah (manusia) yang berusaha mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan menghimpun secara konseptual aspek-aspek yang juga merupakan muatan budaya, dilakukan strategi kebudayaan yang menyederhanakan prosedur operasional budaya dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan sosial. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi*, diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia (Nsd.co.id, n.d.).

Kata budaya merupakan bentuk majemuk dari kata *memelihara*, yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Kata "*culturur*" berarti "budaya" dalam bahasa Belanda. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*culture*" (Admin, n.d.-a). Kemudian, dalam pengertian kultural pengertian ini dipahami sebagai segala tindakan dan tenaga manusia yang digunakan untuk mengolah dan mengubah alam. Bahasa resmi masyarakat Betawi adalah bahasa Indonesia, dan bahasa sehari-hari atau informal mereka adalah bahasa Indonesia dengan dialek Betawi. Dialek Betawi luar dan dialek Betawi tengah adalah dua kategori yang termasuk dalam dialek Betawi dalam hal ini. Secara umum, dialek Betawi tengah adalah "e", tetapi dialek Betawi pinggir adalah "a" (Purbasari, 2010). Edward Burnett Tylor mendefinisikan budaya sebagai sistem komprehensif yang terdiri dari informasi, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan keterampilan lain yang dikembangkan seseorang sebagai anggota masyarakat. Secara umum, betawi merupakan hasil penyatuan berbagai peradaban, baik yang asli nusantara maupun yang didatangkan dari luar. Mereka yang mengidentifikasi sebagai Betawi secara genetik diturunkan dari beragam asal etnis dan bangsa. Mereka

adalah hasil dari pernikahan interetnis dan internasional historis. Sebuah kelompok etnis yang dikenal sebagai suku Betawi sebagian besar berada di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Mereka adalah keturunan dari beberapa kelompok etnis berbeda yang pernah tinggal di Batavia (nama Jakarta diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda) sejak abad ke-17. Banyak orang mengira bahwa suku Betawi turun temurun melalui persatuan antaretnis dan antarbangsa yang bersejarah (Syafawy, 2018). Orang-orang yang beridentitas Betawi secara biologis adalah keturunan dari orang-orang yang dibawa ke Batavia oleh Belanda dan memiliki darah campuran dari suku dan negara lain. Suku ini sebenarnya dianggap pendatang baru di Jakarta karena berasal dari pertemuan beberapa suku yang sebelumnya mendiami kota tersebut, antara lain suku Sunda, Melayu, Jawa, Bugis, dan Ambon di antara penduduk asli, serta Arab dan Tionghoa (Syafawy, 2018). Budaya dan kesenian masyarakat Betawi sangat erat kaitannya satu sama lain dan pada saat yang sama secara gamblang mencerminkan pengaruh dari berbagai tempat sepanjang sejarahnya. Musik mereka dipengaruhi oleh berbagai budaya seperti Portugis, Arab, Melayu, dan Cina. Tarian mereka juga memiliki unsur budaya Sunda, Jawa, dan Tionghoa (Admin, n.d.-b).

Secara teori, implementasi suatu kebijakan adalah bagaimana ia mewujudkan tujuannya. Tidak ada yang lebih atau kurang sesuai. Ada dua pilihan dalam menjalankan kebijakan publik yaitu mengeksekusinya secara langsung dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Perkembangan implementasi kebijakan mulai dari program, proyek, dan kegiatan dapat dilihat dengan jelas (Fallis, 2013).

Model ini sesuai dengan proses manajemen yang khas, khususnya di sektor publik. Program yang dikembangkan menjadi proyek yang kemudian ditransformasikan menjadi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat adalah bagaimana kebijakan dikembangkan. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), ada empat faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan: 1. Komunikasi, atau kebutuhan agar implementor menyadari apa yang harus dilakukan dan agar kelompok sasaran (target group) diberitahu tentang tujuan dan sasaran kebijakan untuk meminimalkan distorsi implementasi. 2. Sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara konsisten dan baik, jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, implementasi akan gagal. Sumber daya ini dapat ditemukan dalam bentuk sumber daya keuangan, sumber daya manusia, seperti keahlian pelaksana, dan sumber daya lainnya. 3. Disposisi mengacu pada kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki pelaksana, seperti dedikasi, kejujuran, dan sifat demokratis. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan serta apa yang diinginkan pembuat kebijakan tergantung pada disposisi implementor. Proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif ketika implementor memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan. 4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Fragmentasi

dan Standard Operating Procedure (SOP) merupakan elemen struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung mengganggu pengawasan dan mengakibatkan birokrasi, atau prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan rumit, yang membuat operasi organisasi menjadi kaku.

Terminologi kurikulum yang mengacu pada penyusunan RPP telah dimasukkan ke dalam leksikon bahasa Indonesia. Kata "curriculum" (yang berarti "bahan ajar") berasal dari bahasa Latin, sedangkan "courier" (yang berarti "menjalankan") berasal dari bahasa Perancis. Kurikulum dapat dipahami sebagai rencana atau pembahasan pengajaran dari segi pemakaian bahasa, yang memperjelas dan menerangi arah kegiatan pendidikan. Pemahaman ini terkait dengan komponen kurikulum yang paling penting, yaitu pemilihan sumber atau topik yang akan dijadikan pedoman dalam kegiatan pembelajaran (Heizer, 2018). Oemar Hamalik menegaskan bahwa ada dua cara untuk melihat konsep kurikulum: dari pandangan lama dan dari pandangan baru. Menurut penjabaran kurikulum dari pandangan lama disebut juga dengan pandangan tradisional yaitu terdiri dari mata pelajaran yang harus ditempuh siswa untuk dapat lulus. Sebaliknya, dalam perspektif baru, kurikulum bersifat ekstensif karena mencakup semua kegiatan dan pengalaman ekstrakurikuler yang berada di bawah lingkup sekolah, selain kelas. Mencermati rincian tersebut di atas, pengamatan Syaiful Sagala menyatakan bahwa kurikulum tidak hanya sekedar pada penguatan akal, menambah wawasan, dan memperluas pengetahuan di samping pembelajaran mata pelajaran akademik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sanjaya, kurikulum tidak semata-mata bergantung pada kegiatan yang dilakukan siswa ketika mempelajari bahan ajar, dsb. Namun, kurikulum mencakup topik yang lebih luas karena berkaitan dengan arah dan tujuan pendidikan.

METODOLOGI

Studi pustaka ini menggunakan metode *Literature Riview atau Narrative Review*. *Literature Review* atau *Narrative review* merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode *Narrative review* adalah suatu penelusuran dan penelitian terhadap sebuah topik atau isu tertentu dengan cara mengumpulkan data dari membaca berbagai buku, jurnal dan terbitan lainnya yang nantinya akan dikumpulkan untuk dibuat sebuah tulisan ilmiah baru oleh peneliti (Marzali, 2017). Pada penelitian ini seluruh sumber kepustakaan yang digunakan berasal dari *research article* nasional dan internasional yang dapat diakses pada *search engine* secara bebas.

Penelitian dengan studi literatur ini memiliki persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini. Penelitian studi literatur ini menganalisis dengan matang dan mendalam agar mendapatkan hasil yang objektif tentang Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi (Studi Kasus: Kurikulum Pendidikan). Data yang dikumpulkan dan dianalisis

merupakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data analisis isi (*content analysis*). Analisis data diawali dengan analisis hasil penelitian yang paling relevan, relevan dan cukup relevan. Kemudian pertimbangkan tahun penelitian, dimulai dengan yang terbaru, dan secara bertahap kembali ke tahun yang lebih lama. Peneliti lalu membaca abstrak dari setiap penelitian yang lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini. Selanjutnya dengan mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Bentuk Implementasi Pemerintah Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Betawi Pada Bahasa Betawi Ke Dalam Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

Badan kebudayaan memandang proses pengajaran bahasa Betawi sangat penting karena bahasa Betawi memiliki kaidah-kaidah yang harus dipahami sejak dini oleh masyarakat, khususnya pelajar, agar dapat menggunakan bahasa Betawi dengan baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Betawi itu sendiri. Bahasa dan sastra Betawi masih ada dan tidak punah. Seperti bahasa daerah lainnya di Indonesia, karena hanya bahasa Indonesia dan Inggris yang digunakan dan diajarkan di sekolah-sekolah di DKI Jakarta, berbeda dengan daerah lain seperti Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kajian sebelumnya yang dilakukan oleh para pegiat budaya Betawi dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan pelestarian bahasa dan sastra Betawi di Jakarta. Bahwa ketiadaan tempat untuk pengajaran bahasa dan sastra Betawi secara formal maupun informal telah menghambat upaya pelestarian tersebut. Minimnya pendataan bahasa dan sastra Betawi oleh pemerintah dan masyarakat Betawi di setiap wilayah Betawi juga menjadi kendala, begitu juga dengan belum adanya wadah bagi masyarakat Betawi untuk melestarikan bahasa dan sastra Betawi, karena informasi ini akan berfungsi sebagai dasar masyarakat untuk melakukannya. (Ali, 2022).

Karena masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan organisasi budaya Betawi dalam menentukan materi Bahasa dan Sastra Betawi sendiri untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya Bahasa dan Sastra Betawi, Pemerintah DKI Jakarta menerapkan Perda Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi khususnya Pendidikan Bahasa dan Sastra Betawi masih belum ideal. Peraturan pelaksanaan yang lebih tepat, seperti Peraturan Gubernur tentang muatan lokal yang khususnya memasukkan Bahasa dan Sastra Betawi, diperlukan dalam rangka melakukan inisiatif untuk mempertahankan budaya bahasa dan sastra Betawi (Kompas, n.d.). Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan mata pelajaran kepada siswa SD/SDLB/Madrasah sebagai bagian dari pelaksanaan pemberdayaan budaya Betawi melalui pendidikan. Selain itu,

Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan pernyataan bahwa semua aspek budaya Betawi telah dimasukkan ke dalam muatan lokal melalui Pasal 5 Peraturan Gubernur tentang muatan lokal, yang menentukan kurikulum yang akan diajarkan untuk muatan lokal di tingkat sekolah dasar.

Pembelajaran implisit menjadi persoalan utama jika tidak ada pendidikan dasar mengenai suatu pengetahuan yang tidak dapat dijadikan landasan praduga untuk menyatakan bahwa pendidikan dapat berfungsi dengan baik, ditambah lagi tidak ada lagi peraturan teknis untuk mengatur pembelajaran bahasa dan sastra di daerah DKI Jakarta. Karena perkembangan bahasa Betawi dipengaruhi oleh afiliasi suku-suku berbeda yang terlibat dalam masyarakat Betawi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat ini kekurangan sumber struktur bahasa, dialek bahasa, dan sastra Betawi. Bahwa persebaran hubungan, perdagangan, dan perkawinan antara orang Betawi dan suku-suku yang pada masa itu bersentuhan langsung dengan Betawi menjadi dasar dialek bahasa dan sastra di Betawi.

Faktor yang menghambat Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada Kurikulum Pendidikan

Bagi pemerintah DKI Jakarta maupun para penggiat dan/atau komunitas budaya Betawi, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan bahasa Betawi ke dalam kurikulum pendidikan, beberapa di antaranya adalah:

1. Faktor Hukum

Persoalan faktor dalam hal ini adalah jika pembelajaran bersifat implisit tetapi tidak ada pendidikan dasar mengenai suatu pengetahuan, maka tidak dapat dijadikan landasan asumsi untuk menyatakan bahwa pelestarian budaya dalam pendidikan sudah berhasil. Selain itu, tidak ada lagi peraturan teknis pembelajaran Bahasa dan Sastra dalam muatan lokal DKI Jakarta.

Penulis berkesimpulan bahwa dari segi hukum, belum ada peraturan pelaksanaan yang lebih khusus untuk pelestarian bahasa dan sastra di Jakarta. Diketahui, untuk pelestarian bahasa dan sastra, Pasal 10 huruf e Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 memiliki peraturan turunan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 229 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi. Di mana dalam seni tidak diikuti dengan implementasi yang lebih detail dalam karya sastra dan linguistik daerah. Belum ada upaya maksimal yang dilakukan oleh dinas pendidikan DKI Jakarta untuk secara tegas menjaga bahasa dan sastra sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Muatan Lokal. Penulis tidak menemukan aturan khusus untuk melindungi bahasa dan sastra Betawi dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (7).

Dinas Pendidikan DKI Jakarta berpendapat bahwa ciri-ciri bahasa dan sastra Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi belum dimasukkan dalam kelas pelestarian di kalangan siswa sekolah dasar atau menengah di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan penggunaan

bahasa dan sastra di masyarakat, Dinas Kebudayaan berkeyakinan bahwa bahasa dan sastra harus dilibatkan dalam proses pelestarian, khususnya dalam bidang pendidikan.

2. Faktor Komunikasi

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta harus membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan, lembaga budaya, dan seluruh penduduk Jakarta agar mereka tahu apa yang harus dilakukan, di mana tujuan dan sasaran harus dikomunikasikan, dan bagaimana melakukannya dengan cara yang akan mengurangi distorsi implementasi.

3. Faktor Sumber Daya

Faktor fundamental yang menentukan efektif atau tidaknya suatu produk hukum adalah masyarakat. Namun, kita juga tahu bahwa hukum harus dibentuk dengan memperhatikan keselarasan antara norma, nilai, dan keadaan sosial. Masyarakat selama ini berupaya melestarikan budaya bahasa dan sastra, khususnya dengan menyelenggarakan berbagai bentuk acara seni budaya. Kelompok ini masih memiliki sedikit perlindungan terhadap kehilangan jejak bahasa peradaban Betawi. Ketidakpedulian masyarakat akan bahasa Betawi serta praktik monopoli bahasa Indonesia di sekolah dasar dan menengah telah merubah bahasa tersebut dari bahasa dengan aturannya sendiri menjadi bahasa Indonesia versi kasar. Bahasa Betawi pada akhirnya dianggap oleh sebagian orang Betawi sebagai budaya yang ketinggalan zaman dan tidak ramah jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, bahasa dan sastra Betawi merupakan bagian tak terpisahkan dari salah satu peradaban yang diakui keberadaannya oleh negara.

4. Faktor Disposisi

Pemerintah daerah harus memiliki karakteristik seperti komitmen, kejujuran, dan demokrasi. Jika pemerintah daerah memiliki sikap yang baik, maka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Proses implementasi juga dapat menjadi tidak efektif dan menemui kendala dalam proses implementasi ketika para pelaksana memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda.

5. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum

Dengan adanya Kampung Budaya Betawi Setu Bakbakan yang diawasi langsung oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ini sangat membantu pemberdayaan budaya Betawi, namun sarana dan prasarana tersebut dirasa belum cukup untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan bahasa Betawi. dan sastra. Hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelestarian bahasa dan sastra Betawi.

6. Faktor Kebudayaan

Faktor ini juga bisa dikatakan sebagai kendala utama, karena budaya masyarakat Betawi kurang memperhatikan bahasa dan sastra Betawi. Kekhawatiran pemuda Betawi kini juga berkurang untuk menggunakan bahasa Betawi karena bahasa sehari-hari mereka telah

beralih ke bahasa ibu atau menggunakan bahasa asing. Oleh karena itu, bahasa Betawi sangat perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan muatan lokal untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya.

PEMBAHASAN

Kota utama Indonesia, Jakarta adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya. Nilai-nilai budaya daerah memainkan peran penting dalam sejumlah budaya nasional dan harus dilindungi undang-undang. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi, khususnya bahasa Betawi, belum memenuhi aspek budaya, sehingga belum ditambahkan dalam kurikulum pendidikan muatan lokal. Untuk mencegah kepunahan bahasa Betawi khususnya di Jakarta, pemerintah khususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta saat ini sedang memikirkan bagaimana menerapkan peraturan daerah yang memungkinkan bahasa Betawi diajarkan di sekolah-sekolah (Mustofa et al., 2020).

Berikut yang dinyatakan dalam Pasal 18 B Perubahan UUD 1945 (4) yang memiliki landasan intelektual dan hukum yang paling besar: "Selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikuasai oleh hukum, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya."

Bahwa Pasal 4 Perubahan Pasal 32 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara dalam rangka melestarikan masyarakat hukum adat: 1. Di tengah peradaban global, negara mendukung kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk mempertahankan dan memajukan nilai-nilai budayanya. 2. Bahasa daerah dihargai oleh negara sebagai kekayaan budaya bangsa dan dilestarikan.

Seluruh aparatur pemerintah, termasuk yang berada di pusat dan khususnya pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk melindungi semua ragam tradisi budaya yang ada di Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini karena perkumpulan masyarakat adat tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelangsungan hidup Indonesia harus dijaga karena merupakan komponen vital bangsa dan sumber kekayaan bagi rakyat Indonesia.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi Untuk Bahasa Betawi belum sepenuhnya mengimplementasikan seluruh aspek penerapan budaya bahasa dan sastra ke dalam kurikulum pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi. Menurut penulis, hal ini mengakibatkan penggunaan bahasa dan sastra Betawi sangat terbatas di tengah pesatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, percampuran budaya, akulturasi budaya, percepatan pembangunan Jakarta, dan westernisasi masyarakat Jakarta khususnya masyarakat Betawi. Selain itu, bahasa Betawi tidak termasuk dalam kurikulum pendidikan konten. budaya lokal, yang menyebabkan banyak generasi

muda tidak mengenal bahkan melupakan bahasa Betawi sebagai generasi budaya lokal (Febriansyah, 2022).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang perlindungan bahasa Betawi oleh pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan budaya Betawi, ditemukan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta sangat masih bekerja keras untuk melestarikan bahasa dan sastra. Betawi dalam tahap koordinasi dengan pemangku kepentingan dari masyarakat Betawi dan dinas terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menegakkan Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015. Memantau dan mengevaluasi pelestarian bahasa dan sastra Betawi dengan menambahkan berbagai tugas dan bekerja sama dengan berbagai elemen pemerintah DKI Jakarta, pemangku kepentingan, organisasi budaya dan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Berbagai inovasi baru juga dilakukan untuk mendukung pelestarian bahasa dan sastra Betawi guna memasukkan bahasa Betawi ke dalam kurikulum pendidikan muatan lokal.

Kurangnya kesadaran pejabat Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat akan pentingnya meneliti dan mensosialisasikan perlindungan bahasa dan sastra Betawi, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan tentang perlindungan bahasa dan sastra Betawi antara pejabat dinas dan masyarakat. Jakarta. Untuk itu perlu disikapi secara serius oleh pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan bahasa Betawi yang sampai saat ini belum masuk dalam kurikulum pendidikan padahal sangat diperlukan karena pemuda atau pelajar merupakan kunci untuk mencapai retensi di tingkat sekolah dasar. dan tingkat pendidikan menengah bahasa Betawi, pemuda menjadi pewaris generasi penerus, bangsa dan budaya agar dapat bertahan hidup.

Rekomendasi

Melalui penelitian ini diharapkan pembelajaran bahasa Betawi dapat diterapkan di setiap sekolah, baik di sekolah dasar maupun menengah. Menyusun rencana induk pelestarian bahasa dan sastra Betawi yang memuat rencana aksi khusus jangka pendek, menengah, dan panjang serta rencana strategis dalam rangka pelestarian bahasa dan sastra Betawi. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra Betawi yang meliputi unsur Pasal 9 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Budaya Betawi Pendidikan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi melalui aparat atau aparat penegak hukum Perlindungan sekaligus terhadap bahasa dan sastra Betawi. Dan diharapkan pemerintah daerah tetap memperhatikan budaya Betawi, khususnya bahasa Betawi, untuk melestarikannya dan mencegah ancaman kepunahan.

PENELITIAN LANJUTAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada kepada Pemerintah Daerah dapat melestarikan Bahasa Betawi dengan cara mensosialisasikan dan menerapkannya ke dalam kurikulum pendidikan sehingga Bahasa Betawi itu sendiri dapat terus terjag. Sehubungan dengan itu, penulis menyarankan penelitian lebih lanjut tentang topik pembahasan ini, yang berlaku untuk objek yang lebih luas, materi yang lebih umum dan metode yang lebih relevan untuk menggeneralisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan studi pustaka ini, yaitu kepada: Kedua Orangtua saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya, Iskandarsyah Siregar, selaku Kepala Pusat Studi Sosiobudaya Nusantara, dan Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Universitas Nasional yang telah membimbing saya dalam menyusun makalah penelitian ini, kepada Sari Tri Anjani yang sudah membantu saya, memberikan dukungan semangat dan mendampingi proses penyusunan penelitian ini sampai akhir, dan terakhir kepada kedua teman sekaligus sahabat saya Sara Dwi Anjani, Hannan Ghifari yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang membuat saya tetap semangat dalam menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (n.d.-a). *Kebudayaan Betawi Dari Kerajaan Hingga Kuliner*. [https://www.kebudayaanbetawi.com/2983/kebudayaan-betawi-dari-kerajaan-hingga-kuliner/#:~:text=Betawi secara umum merupakan hasil,campuran aneka suku dan bangsa](https://www.kebudayaanbetawi.com/2983/kebudayaan-betawi-dari-kerajaan-hingga-kuliner/#:~:text=Betawi%20secara%20umum%20merupakan%20hasil,campuran%20aneka%20suku%20dan%20bangsa)
- Admin. (n.d.-b). *Suku Betawi: Kebudayaan Jakarta Raya - Jalur Rempah*. <https://jalurrempah.kemdikbud.go.id/foto/suku-betawi-kebudayaan-jakarta-raya-jalur-rempah>
- Ali, M. N. M. (2022). Implementasi Pasal 10 Huruf E Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <http://175.45.184.14/index.php/hukum/article/view/4551>
- Fallis, A. . (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Febriansyah, M. R. (2022). Strategi Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Melestarikan Budaya Ondel-Ondel. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 35–43.
- Heizer, R. (2010). (2018). Bab Ii Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.

- Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1-11. <https://doi.org/10.14710/sabda.v10i2.13248>
- Kompas. (n.d.). *Bahasa Betawi Belum Diprioritaskan sebagai Mulok*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2009/07/23/20111548/megapolitannews>
- Mustofa, E., Rahmatulloh., & Suendarti, M. (2020). Aspek Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, XI(2), 33-45.
- Nsd.co.id. (n.d.). *Pengertian Kebudayaan*. <https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>
- Purbasari, M. (2010). Indahnya Betawi. *Humaniora*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i1.2142>
- Sabrina, A., Siregar, I., & Sosrohadi, S. (2021). Lingual Dominance and Symbolic Power in the Discourse of Using the PeduliLindungi Application as a Digital Payment Tool. *International Journal of Linguistics Studies*, 1(2), 52-59. <https://doi.org/10.32996/ijls.2021.1.2.8>
- Salsabila, Siregar, I., & Sosrohadi, S. (2021). Analysis of Code Mixing in Jerome Polin Youtube Content "Nihongo Mantappu". *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 4(12), 01-08. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2021.4.12.1>
- Siregar, Iskandarsyah. (2016). *Eksposisi General Psikolinguistik*. Jakarta: LPU Unas
- Siregar, I., Rahmadiyah, F., & Siregar, A. F. Q. (2021). Therapeutic Communication Strategies in Nursing Process of Angry, Anxious, and Fearful Schizophrenic Patients. *British Journal of Nursing Studies*, 1(1), 13-19. <https://doi.org/10.32996/bjns.2021.1.1.3>
- Siregar, I., Rahmadiyah, F., & Siregar, A. F. Q. (2021). Auditorium Model Assessment with Corrected Acoustic Function. *British Journal of Physics Studies*, 1(1), 01-06. Retrieved from <https://al-kindipublisher.com/index.php/bjps/article/view/2610>
- Siregar, I. & Siregar, R. (2021). The Relevances between Poda Na Lima Philosophy with Islamic Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3240>

- Siregar, I. & Salsabila. (2021). Acts of Illocutionary Speech by Ganjar Pranowo in the "One Hour Closer" Talkshow. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 1(1), 95-100. <https://doi.org/10.32996/ijahs.2021.1.1.14>
- Siregar, I. & Sabrina, A. (2021). Representation of Religious Values in Gurindam Twelve and Their Relevances with Modern Era. *International Journal of Cultural and Religious Studies*, 1(1), 50-57. <https://doi.org/10.32996/ijcrs.2021.1.1.7>
- Siregar, I. (2021). Verbal Communication of Schizophrenic Patients Due to Neurotransmitter Distortion. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 543-556.
- Siregar, I. (2020). *Exploration and Implementation of the Cultural System as a Solution to National and State Problems*. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/811>
- Siregar, I. (2021). Analysis of Betawi Language Interference on the Morphology of Adolescent Speech in Jakarta. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 3(8), 54-60. <http://doi.org/10.32996/jhsss.2021.3.8.7>
- Siregar, I. (2020). *Geografi Leksikon Betawi*. Jakarta: LPU Unas
- Siregar, I. (2021). Epistemological Challenges Against Sociolinguistics. *International Journal of Linguistics Studies*, 1(2), 37-42. <https://doi.org/10.32996/ijls.2021.1.2.6>
- Siregar, I. (2021). The Existence of Culture in its Relevance to the Dynamics of Globalization: Bahasa Indonesia Case Study. *International Journal of Cultural and Religious Studies*, 1(1), 33-38. Retrieved from <https://www.al-kindipublisher.com/index.php/ijcrs/article/view/2285>
- Siregar, I., Rahmadiyah, F., & Siregar, A. F. Q. (2021). Linguistic Intervention in Making Fiscal and Monetary Policy. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 1(1), 50-56. <https://doi.org/10.32996/ijahs.2021.1.1.8>
- Siregar, I., (2021). *Research Methodology*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia
- Siregar, I., Rahmadiyah, F., & Siregar, A. F. Q. (2021). The Impact of Multisensory Stimulation of Biological Organs in Dysarthria Patients as Articulation Skills Rehabilitation. *British Journal of Nursing Studies*, 1(1), 20-29. <https://doi.org/10.32996/bjns.2021.1.1.3z>
- Siregar, I., & Zulkarnain. (2021). CSR-Based Corporate Environmental Policy Implementation. *British Journal of Environmental Studies*, 1(1), 51-57. Retrieved
- Siregar, I. (2022). Cyber Library Auditorium Acoustic Evaluation in Acoustic Phonetic Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute*

(BIRCI-Journal): *Humanities and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4234>

Siregar, I. (2022). Islamic Values in Palang Pintu Procession in Semiotic Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4239>

Siregar, I. (2022). Criticism of Philosophical Approaches to Sociolinguistics. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4233>

Siregar, I. (2022). The Effectiveness of Linguistics in Studying Fiscal and Monetary Policy Issues. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4235>

Siregar, I. (2022). The Effectiveness of Multisensory Stimulation Therapy in People with Specific Language Disorder. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4238>

Siregar, I. (2022). Semiotics Analysis in The Betawi Traditional Wedding "Palang Pintu": The Study of Semiotics Roland Barthes. *International Journal of Linguistics Studies*, 2(1), 01–07. <https://doi.org/10.32996/ijls.2022.2.1.1>

Siregar, I., & Zulkarnain. (2022). The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2(1), 09–16. <https://doi.org/10.32996/bjahs.2022.2.1.2>

Siregar, I. (2022). Implications of Learning Methods Based on Multisensory Stimulation Therapy in Patients with Transcortical Aphasia. *ITALIENISCH*, 12(1), 809–818. <https://doi.org/10.1115/italienisch.v12i1.252>

Siregar, I. (2022). Papuan Tabla Language Preservation Strategy. *LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.33258/linglit.v3i1.620>

Siregar, I. (2022). Language Response as a Cultural Element to Globalization. *Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture*, 3(1), 8-18. <https://doi.org/10.33258/lakhomi.v3i1.619>

Siregar, I. (2022). Semiotic Touch in Interpreting Poetry. *Britain International of Linguistics, Arts, and Education (BioLAE-Journal)*, 4(1), 19-27. <https://doi.org/10.33258/biolae.v4i1.618>

- Siregar, I., & Yahaya, S. R. (2022). Semiotic Exploration of Roti Buaya as a Cultural Ornament. *British Journal of Applied Linguistics*, 2(1), 06–13. <https://doi.org/10.32996/bjal.2022.2.1.2>
- Siregar, I. (2022). Effective and Efficient Treatment of Regional Language Preservation Strategies in the Nusantara. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4(2), 16–22. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.2.3>
- Siregar, I., & Yahaya, S. R. (2022). Betawi Speech Shift in Internal Family Communication. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7511>
- Siregar, I., Anjani, S. D., & Yahaya, S. R. (2023). Projection of the Vitality of the Betawi Language in the Future Time in Jakarta. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 6(3), 39–46. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2023.6.3.4>
- Syafawy, I. (2018). Implementasi Perda No.4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi Perspektif Siyasa (Studi Kasus Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur). *Bitkom Research*, 63(2), 1–3. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf
https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf
[https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607 -Bitkom-KPM](https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom-KPM)
- Yetno, A. (2021). Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No.7 Tahun 2021*. <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/188/148>